



Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Dompu)

Liyanti^{1*}, Samsudin², Shoalihin³

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

²⁻³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

*Penulis Korespondensi: liyanti6007@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) and its relationship with the quality of financial statements at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Dompu Regency. A qualitative case study approach was employed to obtain an in-depth understanding of the implementation process, supporting factors, challenges, and its contribution to financial reporting quality. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of accrual-based SAP has been carried out effectively, supported by the use of SIPD RI, compliance with applicable accounting standards, and strong organizational commitment. However, several challenges remain, particularly limited human resource competence in accrual accounting and technical issues related to the accounting system. These challenges are addressed through training, self-learning, and technical guidance to improve staff capabilities and system utilization. Overall, the implementation of accrual-based SAP contributes to improving the quality of financial statements, particularly in terms of relevance, reliability, comparability, and understandability. These findings highlight the importance of continuous capacity building and system improvement.*

Keywords: *Accrual-Based; BPKAD; Financial; Government Accounting System; Report Quality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual serta hubungannya dengan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penerapan, faktor pendukung, tantangan, dan kontribusinya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual telah dilaksanakan secara efektif, didukung oleh penggunaan SIPD RI, kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta komitmen organisasi yang kuat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, khususnya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntansi akrual dan kendala teknis terkait sistem akuntansi. Tantangan-tantangan tersebut diatasi melalui pelatihan, pembelajaran mandiri, dan bimbingan teknis guna meningkatkan kemampuan staf serta pemanfaatan sistem. Secara keseluruhan, penerapan SAP berbasis akrual berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Berbasis AkruaI; BPKAD; Keuangan; Kualitas Laporan; SAP.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan bagian penting dalam reformasi keuangan sektor publik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di Indonesia, penerapan SAP berbasis akrual secara resmi diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Basis akrual memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif, tidak hanya mencerminkan arus kas saja, tetapi juga

mencakup posisi keuangan, hak dan kewajiban, serta kinerja keuangan pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena itu, SAP berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti ketidakkonsistenan dalam pencatatan transaksi, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK RI, 2022; BPK RI, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual belum dioptimalkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Permasalahan dalam menerapkan SAP berbasis akrual tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan keuangan saja, tetapi juga mencerminkan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang dijalankan oleh aparatur pemerintah. Dalam konteks ini, penerapan SAP berbasis akrual dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pemahaman, interpretasi, serta praktik aparatur dalam menerapkan standar akuntansi.

Hal ini berdampak pada kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal keandalan, relevansi, dan keterbandingan informasi. Laporan keuangan yang belum disusun secara optimal berpotensi mempengaruhi tingkat akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta membatasi pemanfaatan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan (Halim & Kusufi, 2012; Nordiawan, (2009). Beberapa studi sebelumnya telah meneliti implementasi SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah. Temuan studi-studi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sistem informasi, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap standar akuntansi (Herinda & Sulistiyowati, 2023; Rosana & Bharata, 2023; Afriyeni *et al.*, 2024; Mutia & Segarawasesa, 2025). Selain itu, implementasi SAP berbasis akrual juga berkaitan dengan bagaimana kualitas laporan keuangan disusun dan disajikan oleh entitas pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mardika & Ismail, 2021) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan relevansi, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip akrual dan penerapannya di lapangan, yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (Ikrima & Abdullah, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, sebagian besar di antaranya lebih berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual dan belum banyak menggambarkan secara mendalam bagaimana proses penerapannya dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana aparatur pemerintah memahami pemahaman, menginterpretasikan, dan menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk melakukan penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam guna melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas praktik dilapangan (Sugiyono, 2022). Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan SAP berbasis akrual sebagai suatu proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan praktik, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran empiris yang mendalam mengenai bagaimana implementasi SAP berbasis akrual dijalankan dalam praktik serta bagaimana implementasi tersebut tercermin dalam kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta bagaimana implementasi tersebut tercermin dalam kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory

Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung yang saling melengkapi, yaitu teori implementasi kebijakan, teori kelembagaan, dan teori akuntabilitas publik. Ketiga teori ini digunakan untuk memahami implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual serta kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pelaksana dilapangan. Proses ini tidak hanya melibatkan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, kejelasan tujuan kebijakan, dan dinamika lingkungan organisasi. Dalam penelitian ini, SAP berbasis akrual dipahami sebagai kebijakan yang harus diimplementasikan oleh aparatur pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Selanjutnya, teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2014) menjelaskan bahwa organisasi dipengaruhi oleh tekanan regulasi, norma, dan nilai

yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, implementasi SAP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan dan dipengaruhi oleh konteks kelembagaan. Selain itu, teori akuntabilitas publik, yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Laporan keuangan menjadi salah satu media utama dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting. Dengan demikian, teori-teori ini memberikan pemahaman bahwa implementasi SAP berbasis akrual merupakan suatu proses yang melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, dan tanggung jawab publik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI merupakan penerapan sistem akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penerapan SAP berbasis akrual diwajibkan bagi seluruh entitas pemerintah sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana aparatur pemerintah memahami, menginterpretasikan, dan mampu menerapkan standar tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dukungan sistem informasi akuntansi, serta komitmen organisasi dalam mendukung perubahan sistem keuangan (Mauliza *et al.*, 2025; Tarigan *et al.*, 2025). Oleh karena itu, implementasi SAP berbasis akrual merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kesiapan organisasi secara menyeluruh. Indikator implementasi SAP berbasis akrual meliputi: (1) tingkat pemahaman aparatur terhadap SAP, (2) kemampuan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, (3) pemanfaatan sistem informasi akuntansi, (4) tingkat kepatuhan terhadap standar, dan (5) komitmen organisasi dalam penerapan SAP, yang dikembangkan dari konsep implementasi akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2018) dan (Bastian, 2010).

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,

yang mencakup relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif dan memberikan manfaat bagi pengguna, sedangkan informasi yang andal adalah informasi yang bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya. Selain itu, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas serta disajikan secara jelas agar mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas pemerintahan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses penyusunannya sebagai bentuk akuntabilitas publik. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah (Surbakti & Silviana, 2024). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Indikator kualitas laporan keuangan daerah meliputi: (1) relevansi, (2) keandalan, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, sebagaimana dirumuskan oleh (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) dan didukung oleh (Nordiawan, 2012).

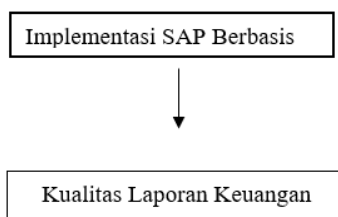
Hubungan Antara Variabel

Dalam penelitian ini, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dipahami sebagai suatu proses yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah. Proses implementasi tersebut mencerminkan bagaimana aparatur pemerintah memahami dan menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan daerah dipandang sebagai refleksi dari proses tersebut, yang ditunjukkan melalui karakteristik relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan demikian, keterkaitan antara implementasi SAP berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan terletak pada bagaimana proses penerapan standar tersebut dijalankan dalam praktik dan tercermin dalam hasil laporan keuangan yang disusun.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan suatu proses yang melibatkan pemahaman aparatur, kemampuan teknis, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, tingkat kepatuhan terhadap standar, serta komitmen organisasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah dipahami sebagai hasil yang menggambarkan proses implementasi tersebut, yang ditunjukkan melalui karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini menekankan keterkaitan antara implementasi SAP berbasis akrual sebagai

proses dengan kualitas laporan keuangan daerah sebagai refleksi dari proses tersebut dalam praktik di BPKAD Kabupaten Dompu.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Implementasi SAP Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Lokasi penelitian ditetapkan di BPKAD kabupaten dompu sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik berdasarkan perspektif informan, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, peraturan perundang undangan terkait SAP berbasis akrual, dan literatur pendukung yang relevan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, memahami penerapan SAP berbasis akrual, memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, serta bersedia memberikan informasi secara objektif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik dan waktu. sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan di lapangan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SAP berbasis akrual dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD berperan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKAD Kabupaten Dompu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan pembentukan perangkat daerah. Secara kelembagaan, keberadaan BPKAD Kabupaten Dompu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah, BPKAD juga berpedoman pada regulasi nasional, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya penerapan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, BPKAD Kabupaten Dompu memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Proses ini tidak hanya melibatkan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, kejelasan tujuan kebijakan, dan dinamika lingkungan organisasi. Dalam penelitian ini, SAP berbasis akrual dijadikan sebagai kebijakan yang harus diimplementasikan oleh aparatur pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Tabel 1. Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Dompu.

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)	Total Aset (Rp)	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)
2021	1.065.607.792.214	1.045.715.132.020	19.892.660.094	1.728.778.670.571	17.187.218.253	1.711.591.452.318
2022	1.128.351.737.388	1.014.939.128.997	113.412.608.391	1,868,873,922,431	18,465,539,820	1.859.408.382.611
2023	1.156.588.895.799	1.063.474.001.448	93.114.894.351	2.163.154.230.554	25.717.520.741	2.137.436.709.813
2024	1.312.172.188.618	1.259.050.961.690	53.121.226.928	2.100.506.558.318	31.421.999.904	2.069.084.558.414
2025	1.300.775.836.287	1.305.613.961.618	-4.838.125.331	2.150.914.916.094	63.246.912.437	2.087.668.003.657

Berdasarkan laporan keuangan BPKAD Kabupaten Dompu periode 2021–2025, kondisi pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan meskipun terdapat penurunan pada tahun 2025. Pendapatan meningkat dari Rp1.065,61 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.312,17 miliar pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp1.300,78 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, belanja daerah cenderung meningkat, terutama pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi tersebut menghasilkan surplus pada tahun 2021–2024, dengan surplus tertinggi sebesar Rp113,41 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2025 terjadi defisit sebesar Rp4,84 miliar karena belanja daerah sebesar Rp1.305,61 miliar lebih tinggi dibandingkan pendapatan sebesar Rp1.300,78 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dari sisi posisi keuangan, total aset mengalami peningkatan dari Rp1.728,78 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.150,91 miliar pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Ekuitas juga menunjukkan peningkatan dari Rp1.711,59 miliar menjadi Rp2.087,67 miliar, sedangkan kewajiban meningkat dari Rp17,19 miliar menjadi Rp63,25 miliar. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi keuangan BPKAD Kabupaten Dompu relatif baik karena nilai ekuitas masih jauh lebih besar dibandingkan kewajiban. Namun, peningkatan kewajiban dan munculnya defisit pada tahun 2025 perlu menjadi perhatian agar pengelolaan keuangan daerah tetap efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Kabupaten Dompu mengacu pada pada SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Perbup Kabupaten Dompu Nomor 54 Tahun 2022 dan Perbup Dompu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Pedoman Sistem dan Prosedur (Sistim Akuntansi): Diatur

melalui Perbup Dompu Nomor 54 Tahun 2022 yang mencakup seluruh proses penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban APBD. Kebijakan Akuntansi: Berdasarkan Perbup Dompu Nomor 56 Tahun 2022 (yang telah diperbarui dengan Perbup Dompu Nomor 47 Tahun 2023), laporan disusun menggunakan basis akrual dan dikonsolidasikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengelolaan Keuangan Daerah (Payung Hukum Utama): Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Dedi Derma Pramna, SE.,M.AK selaku kepala sub bidang akuntansi, pemerintah Kota Dompu dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dijelaskan melalui peraturan yang diatur dalam Perbup Kabupaten Dompu Nomor 54 Tahun 2022 dan Perbup Dompu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Pedoman Sistem dan Prosedur (Sistim Akuntansi) yang telah di sesuaikan dengan SAP berbasis akrual yang dijadikan sebagai landasan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan stansar penerapan standar akuntansi pemerintah daerah yang berbasisi akrual. Selain itu. Diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Eka Sulfiah, S.AK selaku analisis keuangan, bahwa Kebijakan Akuntansi: Berdasarkan Perbup Dompu Nomor 56 Tahun 2022 (yang telah diperbarui dengan Perbup Dompu Nomor 47 Tahun 2023), laporan disusun menggunakan basis akrual dan dikonsolidasikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinilai nahwa untuk setiap pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat standar operasional prosedur yang dimaksudkan agar setiap pelaksana tugas melakukan pekerjaan dengan dasar pada pedoman yang telah ditetapkan.

Implementasi Sap Berbasis Akrual

Pemahaman Aparatur Tentang SAP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Sulfiah, diketahui bahwa pemahaman aparatur mengenai SAP berbasis akrual masih perlu ditingkatkan. Informan menyatakan bahwa dirinya terus belajar untuk menambah pemahaman terkait SAP berbasis akrual dan pernah mengikuti pelatihan secara daring melalui Zoom. Namun, informan belum dapat memastikan apakah seluruh pegawai telah memahami SAP berbasis akrual dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman aparatur masih perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung implementasi SAP berbasis akrual secara optimal.

Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan

kemampuan aparatur pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kemampuan ini mencakup

pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, ketepatan dalam mengidentifikasi dan mencatat transaksi, pengklasifikasian akun, penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, serta ketelitian dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan tersebut juga tercermin dari kemampuan aparaturnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual secara konsisten sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.Dedi Darma Pramna, diketahui bahwa kemampuan aparaturnya dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara umum sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada SAP dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Informan menjelaskan bahwa penerapan basis akrual lebih kompleks dibandingkan basis kas karena transaksi diakui berdasarkan hak dan kewajiban meskipun belum terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Kondisi ini masih menjadi kendala, terutama bagi pegawai baru yang belum sepenuhnya memahami perlakuan transaksi. Untuk mengatasi hal tersebut, aparaturnya perlu terus meningkatkan pengetahuan melalui pembelajaran mandiri dan mengikuti pelatihan yang tersedia.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi proses pencatatan transaksi, pengolahan data keuangan, hingga penyajian laporan keuangan. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga berperan dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui penyediaan fitur-fitur yang telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R.Dedi Darma Pramna, selain itu diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ariawanti S.E, diketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan daerah saat ini digunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, menggantikan sistem sebelumnya yaitu SIMDA. Menurut informan, perbedaan utama antara kedua sistem tersebut terletak pada pengelolaan data, di mana SIMDA menggunakan server lokal yang dikelola masing-masing pemerintah daerah, sedangkan SIPD RI telah terintegrasi secara nasional sehingga data keuangan daerah dapat dipantau secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Informan juga menjelaskan bahwa SIPD RI telah mendukung penerapan SAP berbasis akrual karena dirancang sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan yang berlaku. Meskipun dalam penggunaannya masih terdapat kendala, seperti gangguan jaringan dan masalah teknis sistem, secara umum SIPD RI dinilai sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan daerah.

Tingkat Kepatuhan Terhadap SAP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ariawanti, dari pertanyaan penulis mengenai, Sejauh mana penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP berbasis.? diperoleh informasi bahwa tingkat kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan daerah telah mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berlaku. Informan menyampaikan bahwa seluruh proses penyusunan laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan regulasi SAP, sehingga penyajian informasi keuangan diupayakan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keandalan. Selain itu, informan menjelaskan bahwa sejauh ini tidak terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian yang signifikan dalam penerapan SAP selama proses penyusunan laporan keuangan. Untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar, setiap tahapan penyusunan laporan keuangan selalu mengacu pada peraturan SAP yang berlaku serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari perangkat daerah untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan melalui penerapan standar akuntansi secara konsisten, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Komitmen Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, diketahui bahwa komitmen pimpinan dan organisasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah berjalan dengan baik. Seluruh informan menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan selalu diarahkan agar sesuai dengan SAP yang berlaku. Komitmen tersebut juga didukung oleh organisasi melalui kebijakan, pelatihan, serta penyediaan fasilitas, termasuk penggunaan SIPD RI dan kesempatan mengikuti pelatihan dari kementerian. Menurut ketiga informan, dukungan tersebut membantu penerapan SAP secara konsisten sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan meningkatkan kualitas serta akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Sulfiah,, dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan daerah telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dari aspek relevansi, laporan keuangan dinilai telah memberikan manfaat sebagai dasar dalam mendukung proses

pengambilan keputusan serta disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari aspek keandalan, penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui proses pengecekan dan verifikasi data untuk meminimalkan kesalahan material, serta diperkuat dengan adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, dari aspek keterbandingan, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena penyusunannya dilakukan secara konsisten, meskipun perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi penyajian dan perbandingan laporan antarperiode. Selain itu, laporan keuangan yang disusun dinilai cukup mudah dipahami oleh para pengguna, seperti DPRD maupun masyarakat, dan organisasi juga berupaya meningkatkan pemahaman pengguna melalui pemberian penjelasan apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak R.Dedi Darma Pramna, dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan daerah telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informan menjelaskan bahwa laporan keuangan telah memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan daerah serta disusun sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari aspek keandalan, laporan keuangan melalui proses pengecekan, verifikasi, dan pemeriksaan baik secara internal maupun oleh BPK untuk memastikan keakuratan data dan meminimalkan kesalahan material. Selain itu, laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode karena tetap mengacu pada SAP, meskipun terdapat perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD yang membuat penyajian laporan menjadi lebih rinci. Laporan keuangan juga dinilai mudah dipahami karena dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang membantu pengguna memahami informasi yang disajikan.

Kendala dan Solusi

Berdasarkan Hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BPKAD relatif berbeda. Bapak R.Dedi Darma Pramna menyampaikan bahwa kendala utama terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam memahami pencatatan transaksi yang menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang berkelanjutan dinilai sangat diperlukan. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain belajar secara mandiri, berdiskusi dengan rekan kerja dalam satu bidang, serta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian atau instansi terkait guna meningkatkan pemahaman terhadap SAP berbasis akrual. Selain itu,

Bapak R.Dedi Darma Pramna menekankan bahwa optimalisasi implementasi SAP memerlukan peningkatan kompetensi SDM, pelatihan yang berkesinambungan, serta komitmen seluruh pegawai untuk selalu berpedoman pada SAP dalam setiap proses penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, Ibu Ariawanti menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala yang signifikan dalam penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD. Menurutnya, setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan SAP dalam penyusunan laporan keuangan. Informan kedua juga menegaskan bahwa aspek yang perlu terus ditingkatkan adalah konsistensi seluruh pihak dalam menerapkan SAP secara tepat dan berkelanjutan agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD pada umumnya telah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek kompetensi sumber daya manusia dalam memahami basis akrual, kendala tersebut diatasi melalui pembelajaran mandiri, diskusi, dan pelatihan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM, pelatihan yang berkelanjutan, serta konsistensi dalam berpedoman pada SAP menjadi faktor utama untuk mengoptimalkan implementasi SAP berbasis akrual.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu telah terlaksana dengan baik dan mengacu pada ketentuan SAP yang berlaku. Implementasi tersebut didukung oleh kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta komitmen organisasi dalam menjaga konsistensi penerapan SAP berbasis akrual. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada aspek kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam memahami pencatatan transaksi berbasis akrual, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran secara berkelanjutan. Implementasi SAP berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Dompu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, sehingga mampu mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan kompetensi aparatur dan gangguan pada sistem informasi, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pembelajaran mandiri, diskusi

antarpegawai, pelatihan berkelanjutan, serta komitmen untuk tetap berpedoman pada SAP. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan SIPD RI, dan penguatan komitmen organisasi menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Dompu.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., & Asrina, S. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 474–485. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.885>
- Amal, M. I., Nurfaliza, H., & Wokas, R. N. (2024). Implementation of accrual basis accounting in the public sector in Indonesia: A literature review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 3(1), 361–376.
- Amelia, E., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). Analysis of the implementation of accrual-based government accounting and its implications for the quality of financial reports in the public sector. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(4), 392–409. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i4.2437>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Dharmayuni, L., Rossieta, H., Setyaningrum, D., & Kartika Dewi, M. (2025). Value relevance of accrual information in public sector: Facts from practices. *International Journal of Public Administration*, 48(12), 775–798. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2416443>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Herinda, D. Y. P., & Sulistiyowati, F. (2023). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, sistem informasi akuntansi dinas daerah, dan good public governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: (Studi pada SKPD dan OPD Kabupaten Sleman). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 433–451.
- Ikrima, M., & Abdullah, S. (2025). Determinasi manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota: Bukti empiris dari pandemi Covid-19. *Jurnal Budget*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar akuntansi pemerintahan*.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardika, I. H., & Ismail, T. (2021, February). Implementation of government accounting standards on regional government. In *The 1st International Conference on Regional Economic and Development*. Redwhite Press.

- Mauliza, S., Nissa, F., & Hasibuan, M. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Ikraith-Ekonomika*, 8(3), 954–963.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi sektor publik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010).
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). The prospects for effective implementation of regulatory policy. In *Can regulation work?: The implementation of the 1972 California Coastal Initiative* (pp. 1–26). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1155-3_1
- Scott, W. R. (2014). W. Richard Scott (1995), *Institutions and organizations: Ideas, interests and identities*. *M@n@gement*, 17(2), 136–140. <https://doi.org/10.3917/mana.172.0136>
- Sofa, D. M., Djatu, P. F. P., & Surbakti, M. A. (2024). Analisis penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di Lumbung Rejeki Malang. *Ecopreneur.12*, 7(1), 53–60. <https://doi.org/10.51804/econ12.v7i1.53-60>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.
- Tarigan, R., Gaol, O. K. L., Sihombing, K. B., Hamdani, M., Lubis, P. K. D., & Lubis, N. P. S. (2026). Analisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai strategi peningkatan good governance sektor publik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 7607–7615. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7193>